



Mentri Yuddy Dukung Ahok Soal Gaji Tinggi Pejabat

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaikkan nilai tunjangan kinerja daerah sudah tepat. "Apa yang dilakukan pemerintah DKI tidak salah," kata Yuddy setelah bertemu dengan Basuki di Balai Kota, kemarin. Padahal sebelumnya, Yuddy mempertanyakan kebijakan penggajian pejabat DKI karena dinilai bisa memicu kecemburuan daerah lain.

Mulai tahun ini, pemerintah DKI Jakarta menerapkan sistem penghitungan gaji baru, dengan menambah jumlah tunjangan daerah yang dihitung berdasarkan kinerja. Jika dinilai bekerja dengan baik, seorang lurah memperoleh penghasilan hingga Rp 33 juta per bulan, camat Rp 48 juta, dan wali kota Rp 75 juta. Ahok—begitu Basuki biasa disapa—mengatakan sistem penggajian ini bertujuan menjawab permintaan Presiden Joko Widodo. "Jadi, tunjangan diberikan berdasarkan kinerja, bukan hanya soal kenaikan gaji," ujarnya.

Yuddy mengatakan, pemberian tunjangan yang tinggi ini justru bisa dicontoh provinsi lain. Dengan begitu, pegawai akan menerima penghasilan sesuai prestasinya. "Jakarta bisa jadi role model," katanya.

Camat di Kota Bandung, Jawa Barat, mengaku tak

iri meski mengantongi penghasilan sekitar Rp 13 juta per bulan. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung, Hendrawan, mengatakan penghasilan camat di Bandung tidak bisa disamakan dengan DKI Jakarta. "Sebab pendapatan asli daerah Jakarta lebih tinggi," katanya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, tak setuju dengan gaji tinggi pejabat DKI. Menurut Yayat, keputusan ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi di Ibu Kota. "Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Buruh minta Rp 2,4 juta saja susah sekali," kata Yayat.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah DKI fokus menciptakan lapangan kerja baru, membina usaha kecil, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Lagi pula, Yayat menambahkan, gaji tinggi bukan berarti pegawai tak akan korupsi. "Memangnya DKI Jakarta perseroan terbatas?"

● LINDA HAIRANI | PRAGA UTAMA | ANDRI EL FARUQI | ANWAR SISWADI | ARIE FIRDAUS



Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di ruang rapat Balai Kota, Jakarta, kemarin.